

Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung: Belajar dari Pencalonan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Umum 2019

Political Culture of Nahdlatul Ulama Citizens of Bandar Lampung: Learning from Ma'ruf Amin's Candidacy in the 2019 General Election

Ahmad Robi Ulzikri¹, Robi Cahyadi Kurniawan², Himawan Indrajat³

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

^{2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung, Lampung Indonesia

Email: Ahmad.robiulzikri@gmail.com, robicahyadi9@gmail.com,

Diterima: 19 November 2020

Direvisi: 13 Juni 2021

Disetujui: 28 Juni 2021

DOI: [10.35967/njip.v20i1.108](https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.108)

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlibatan pimpinan tertinggi (*rais aam*) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma'ruf Amin yang ditunjuk sebagai calon wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo dalam pemilihan umum tahun 2019. Permasalahan penelitian muncul ketika publik meragukan soliditas antara elemen struktural NU dan elemen kultural NU (kiai kampung dan pondok pesantren) termasuk di Bandar Lampung. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana budaya politik warga NU kota Bandar Lampung dari kalangan pengurus struktural dan kalangan pondok pesantren dalam momentum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori budaya politik Gabriel Almond dan Sidney Verba. Metode penelitian kombinasi dengan model *concurrent embedded* digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebuah metode penelitian dengan menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif di mana data kualitatif lebih dominan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, tipe budaya politik warga struktural NU adalah budaya politik partisipan, karena memiliki kognisi, afeksi, dan evaluasi terhadap seluruh aspek yang meliputi sistem sebagai objek umum, objek-objek input dan output, serta pribadi sebagai objek dalam sistem dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Hasil kedua, warga kultural NU dari kalangan kiai dan santri pondok pesantren memiliki transisi tipe budaya subjek ke partisipan, hal itu karena, kelompok ini memiliki penilaian yang baik pada objek-objek input, akan tetapi masih memiliki kekurangan dalam partisipasi individu. Sejumlah faktor yang mempengaruhi budaya politik keduanya meliputi tingkat pendidikan, ketokohan, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman keduanya dalam bertindak. Hasil penelitian dengan pendekatan budaya politik dapat disimpulkan bahwa elemen NU struktural dan NU kultural di Bandar Lampung memiliki soliditas dalam memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019.

Kata Kunci: Preferensi, Orientasi, Budaya Politik, Nahdlatul Ulama

Abstract: This research is motivated by the involvement of the highest leadership (*rais aam*) of the Nahdlatul Ulama (PBNU) Executive Board Ma'ruf Amin who was appointed as a vice presidential candidate to accompany the incumbent Joko Widodo in the 2019 general election. Research problems arise when the public doubts the solidity between structural elements. NU and NU cultural elements (village kiai and Islamic boarding schools), including in Bandar Lampung. So, the purpose of this research is to find out how the political culture of the NU residents of Bandar Lampung city from the structural and Islamic boarding schools in the momentum of the Presidential and Vice Presidential Election in 2019. This research is analyzed using the political culture theory of Gabriel Almond and Sidney Verba. The combined research method with the model is concurrent embedded used in this study, which is a research method that combines qualitative and quantitative approaches where qualitative data is more dominant. The results of this study indicate that: first, the type of structural citizen political culture of NU is participant political culture, because it has cognition, affection, and evaluation of all aspects including the system as a general object, objects of input and output, and the person as an object in the system. in the context of the Presidential and Vice-Presidential Election in 2019. The second result, NU cultural residents from the kiai and Islamic boarding school students have a cultural type of transition from subject to participant, this is because this group has a good assessment of input objects,

but still has a deficiency in individual participation. A number of factors that influence the political culture of both include the level of education, character, and values that guide both of them in their actions. The results of research with a political culture approach can be concluded that elements of structural NU and cultural NU in Bandar Lampung have solidity in winning the pair Joko Widodo and Ma'ruf Amin in the 2019 Election.

Keywords: Preference, Orientation, Political Culture, Nahdlatul Ulama

Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlibatan pimpinan tertinggi (*Rais Aam*) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma'ruf Amin yang ditunjuk sebagai calon wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo dalam pemilihan umum tahun 2019. Dinamika politik pencalonan Ma'ruf Amin mulai mencuat ketika pada tanggal 20 September 2018, melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019. KPU telah menetapkan keduanya sebagai pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2019. Penunjukan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden bukan tanpa perhitungan. Kubu petahana mengharapkan akan mampu mendongkrak suara dari kelompok Islam dan menepis isu tentang agama yang kerap diarahkan kepada petahana. Isu-isu tersebut seperti pembubaran kelompok ormas Islam yang dianggap radikal, isu toleransi agama, serta merupakan bentuk antitesis dari kubu penantang yang dicalonkan oleh Ijtimak Ulama yang tidak sepemahaman dengan Ulama NU. Perhitungan ini seperti belajar pada Pilpres 2014 di mana isu skandal media Obor Rakyat, yang merupakan salah satu isu politik dan kampanye kotor yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, secara luas dipuji sebagai politisi reformis baru karena catatannya yang relatif bersih dan kurangnya hubungan langsung dengan kemapanan politik Indonesia. Secara khusus, laporan Obor Rakyat membuat tiga tuduhan serius terhadap Jokowi: bahwa dia adalah seorang Muslim yang buruk, bahwa dia adalah presiden boneka, dan bahwa dia berada di kantong pemodal China yang dikenal sebagai cukong (Tyson & Purnomo, 2017). Maka pada Pilpres 2019, calon petahana Joko Widodo mengatakan bahwa alasan pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi dirinya dilatarbelakangi beberapa alasan. Ma'ruf Amin dinilai sebagai sosok utuh tokoh agama yang bekerja sama, pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). *Rais Aam* PBNU itu juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), sementara berkaitan dengan kebinekaan Ma'ruf Amin juga menjabat sebagai dewan pengarah Badan Pengawal Ideologi Pancasila (BPIP) (Damar, 2018). Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa koalisi dalam pencalonan kandidat dalam Pemilu memang dibentuk untuk memaksimalkan kekuasaan, dengan atau tanpa dinamika yang kerap muncul dalam prosesnya (Khodijah & Subekti, 2020).

Hasilnya adalah pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendorong sentimen positif atas opini publik di media sosial. Menggunakan pendekatan *data mining* menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier menemukan bahwa 40,52% komentar berbicara tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Maruf Amin (Jokowi-Maruf), sedangkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan pasangannya Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) mendominasi komentar sebesar 59,48%. Sebaliknya, untuk hasil polaritas sentimen, pasangan Jokowi-Maruf mendominasi dengan 56,76% sentimen positif dan 43,24% negatif. sentimen, sedangkan Prabowo-Sandi mendapat sentimen positif 24,21% dan sentimen negatif 75,79% (Haryanto et al., 2019).

Permasalahan penelitian muncul ketika seharusnya suara politik warga NU diharuskan satu untuk memenangkan Ma'ruf Amin, tetapi realitas di lapangan publik meragukan soliditas antara elemen struktural NU dan elemen kultural NU (kiai kampung dan pondok pesantren) termasuk di Bandar Lampung. Dukungan terhadap Ma'ruf Amin diragukan bulat sepenuhnya

dikarenakan terdapat dua elemen dalam warga Nahdliyin, yaitu warga Nahdliyin yang ada dalam kepengurusan NU (struktural) dan warga Nahdliyin yang berada di luar kepengurusan NU (kultural) yang berbeda dalam penafsiran Khittah NU 1926 terkait pencalonan Ma'ruf Amin. Hal tersebut yang kemudian menjelang Pemilu 2019 di Jawa Timur muncul Komite Khittah NU 1926 yang terdiri dari tokoh Kultural dan pondok pesantren NU yang dikenal dengan *dzuriyah* (anak cucu pendiri) NU yaitu Solahudin Wahid dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Wahib Wahab dari Pondok Pesantren Tambak beras, dan beberapa tokoh lainnya.

Sejarah telah mencatat bahwa keterlibatan tokoh penting NU dalam kontestasi Pemilu Presiden tidak hanya dilakukan oleh Ma'ruf Amin saja. Pemilihan umum tahun 2004 untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih Presiden secara langsung. Pemilu tersebut juga melibatkan tokoh penting dalam bursa calon presiden dengan latar belakang NU seperti Hasyim Muzadi yang merupakan ketua umum PBNU tahun 1999-2004) yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Hasilnya adalah pasangan tersebut gagal dalam perebutan kursi presiden dan wakil presiden. Salah satu faktornya adalah karena keberagaman di dalam masyarakat NU itu sendiri (Kayane, 2020). Selanjutnya, Salahudin Wahid (Gus Solah) menjadi tokoh NU lain yang masuk dalam bursa calon wakil Presiden. Gus Solah merupakan adik kandung Abdurrahman Wahid (Presiden ke-4 RI) yang juga merupakan tokoh NU mendampingi Wiranto dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2004. Kendati memiliki basis masa yang potensial, pencalonan tokoh NU tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Pemilu 2004 justru dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (Anugrah, 2021). Keterlibatan dua tokoh penting NU dalam pemilu 2004 merupakan salah satu fakta bahwa soliditas NU di kalangan elite tidak sepenuhnya bulat dalam konteks pandangan politik, sehingga meragukan publik dalam Pemilu 2019.

Dinamika politik jelang Pemilu 2019 di Bandar Lampung juga dapat dirasakan. Sebelum pasangan calon Presiden dan wakil presiden ditetapkan, dinamika politik warga NU di Bandar Lampung sudah terlihat ketika santri dari berbagai pondok di Lampung dan Ulama sudah mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden. Ketua koordinator aksi, Malika Saadah mengatakan bahwa aksi tersebut murni dari santri dan tidak berafiliasi dengan NU. Kahabibul Mutaqin yang merupakan Sekretaris PCNU Kota Bandar Lampung juga turut hadir dalam deklarasi yang mengatasnamakan Santri Lampung Untuk Jokowi pada Jumat (3/8/2018), kendati Gerakan tidak mengatas namakan NU, namun gerakan tersebut telah mengindikasikan arah politik masyarakat NU kultural yang mulai bisa ditebak.

Bandar Lampung secara historis bisa dikatakan sebagai representasi keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) di provinsi Lampung. Sejarah mencatat sejak pendirian organisasi NU di Lampung pada tahun 1964, kota Bandar Lampung merupakan satu dari beberapa kota tertua yang sudah ada di Lampung. Di awal keberadaannya saat itu, terdapat tujuh cabang yang sudah berdiri di Lampung yang meliputi Teluk Betung, Kota Bumi, Menggala, Krui, Sukarame, Kota Agung, dan Talang Padang. Kondisi masyarakat yang heterogen di Bandar Lampung tersebut menambah kekayaan tersendiri bagi kehidupan sosial politik masyarakatnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk Bandar Lampung sebanyak 1.166.066 jiwa (BPS Lampung, 2021). Bandar Lampung dapat menjadi tolak ukur atas kemajuan partisipasi politik masyarakat di Lampung, mengingat segala aktivitas demokrasi seperti kegiatan dan aksi hingga peristiwa politik penting kerap digelar di Ibu kota provinsi Lampung tersebut. Secara struktural, NU di Bandar Lampung memiliki akses koordinasi yang cepat dari pengurus wilayah NU yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), mengingat kegiatan administratif kantor PWNU berada di Kota Bandar Lampung.

Lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren sangat identik dengan NU. Mengingat keberadaan kiai di tengah pesantren memiliki pengaruh dan otoritas besar. Sementara NU organisasi sosial masyarakat keagamaan yang memiliki sejarah besar dengan kehidupan

pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, tentu pesantren memiliki ikatan kuat dengan organisasi NU (Goncung, 2015). Kementerian Agama Kota Bandar Lampung mencatat terdapat 63 (enam puluh tiga) Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Bandar Lampung (Kementerian Agama, 2019). Sementara untuk Pondok Pesantren ternama dengan relasi erat dengan organisasi NU seperti Pondok pesantren Madarijul Ulum (Kecamatan Kemiling) dan Al-Hikmah (Kecamatan Way Halim).

Kendati NU secara kelembagaan saat ini bukan merupakan partai politik dan terlepas dari urusan politik praktis, akan tetapi NU memberikan ruang bagi individu warganya untuk terlibat dalam politik. Politik nasional dan keterlibatan tokoh penting NU dalam kontestasi politik tanah air salah satunya adalah keikutsertaan Ma'ruf Amin dalam politik nasional. Keterlibatan tokoh NU tersebut memberikan eskalasi politik yang juga dirasakan ke beberapa daerah terutama daerah dengan basis kultural NU salah satunya di Lampung (Ulzikri, 2019). Telaah awal yang perlu diketahui dalam memahami budaya politik adalah konsep tentang politik. Konsep dimaknai sebagai persepsi satu objek dengan objek lainnya, yang dapat diukur melalui variabel dalam pelbagai tingkat akurasi (Dwiastuti, 2017). Dalam ilmu-ilmu sosial definisi-definisi yang jelas tentang konsepsi sebagai petunjuk arah penelitian adalah hal yang sangat diperlukan (Simanjuntak et al., 2014).

Politik dimaknai sebagai aktivitas masyarakat dalam suatu bangsa dengan tujuan membuat, mempertahankan, serta memperbaiki peraturan sebagai alat dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. dengan tidak terlepas atas peristiwa konflik dan kerja sama (Heywood, 2019). Tujuan di atas dapat diperoleh melalui sebuah instrumen kekuasaan yang berfungsi dalam menetapkan alokasi sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Kekuasaan yang dimaksud merupakan sebuah kemampuan individu dan kelompok dalam mempengaruhi perilaku individu bahkan kelompok tentu saja sesuai dengan si pembuat perintah atau pemilik kekuasaan tersebut (Budiardjo, 2017) Sementara itu, budaya politik berkaitan dengan seluruh pengetahuan, emosional, bahkan penilaian etika moral langsung yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Suryo, 2015). Budaya politik juga berkaitan dengan orientasi politik dan sikap warga negara dalam sistem politik, serta sebuah sikap dari warga negara terhadap sistem tersebut, dengan kata lain budaya politik yang berlaku di sejumlah negara memiliki konsekuensi yang signifikan untuk dukungan publik (Harring et al., 2019). Budaya politik juga berkaitan dengan proses demokrasi, di mana corak politik akan menentukan bagaimana masyarakat di dalamnya berperan dalam kehidupan politik termasuk di dalam proses pemilihan umum (Voinea, 2020). Budaya politik juga memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan pemerintah (Kagan et al., 2018).

Budaya politik kemudian dibagi dalam tiga orientasi yang meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Pertama, orientasi kognitif merupakan sebuah pengetahuan serta kepercayaan pada politik, peranan, serta segala kewajiban berkaitan input dan outputnya. Kognisi tidak hanya sebagai sesuatu yang tertanam di dalam kepala melainkan sebagai yang diwujudkan, tertanam dalam lingkungan, diberlakukan, dibudayakan, dan didistribusikan secara sosial (Ellis, 2019). Kedua, orientasi afektif, adalah kecenderungan emosi atau perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, serta penampilannya (Pulcu & Browning, 2019). Ketiga, orientasi evaluatif, merupakan pertimbangan terhadap sistem politik yang menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik. Berdasarkan tipenya, budaya politik dibedakan ke dalam tiga bentuk tipe kebudayaan, yaitu budaya politik parokial, kaula atau subjek, dan partisipan. Berdasarkan hal tersebut dapat diklasifikasikan seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipe-Tipe Budaya Politik

	Sistem Sebagai Obyek Umum	Obyek-obyek Input	Obyek-Obyek Output	Pribadi Sebagai Partisipan Aktif
Parokial	0	0	0	0
Subyek	1	0	1	0
Partisipan	1	1	1	1

Sumber: Buku Almond dan Verba. Data diolah (2021)

Pertama, pada budaya politik parokial, masyarakat masih memiliki ciri tradisional yaitu peranan politik seperti partisipasi politik yang rendah, yang dipengaruhi oleh faktor kognitif dari masyarakat meliputi tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik ini ditandai dengan tidak berkembangnya harapan akan perubahan dalam sistem politik tersebut. Kedua, budaya politik kaula ditandai dengan kesadaran masyarakat dalam memberikan input politik nihil dan pasif bahkan cenderung lemah. Sebenarnya telah memiliki kesadaran adanya otoritas dari pemerintah. Masyarakat juga sudah aktif memiliki orientasi suka dan tidak suka terhadap pemerintah. Namun, masyarakat masih berkeyakinan bahwa andilnya dalam aktivitas politik tidak memiliki pengaruh untuk perubahan dalam sistem politik. Ketiga, budaya politik partisipan biasanya ada pada kondisi masyarakat di mana setiap individunya telah mampu melibatkan dirinya dalam aktivitas kehidupan politik, misalnya ikut memilih saat pemilu. Budaya politik ini memiliki ciri orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang terbilang baik dan masyarakat telah mampu berperan secara aktif, sebagai akibat munculnya sikap saling percaya di antaranya warga negaranya, sehingga kehidupan demokrasi berkembang dengan baik (Almond & Verba, 1989). Tidak hanya tiga tipe budaya politik di atas, akan tetapi seiring dengan proses perubahan dalam masyarakat akan menghasilkan beberapa tipe budaya peralihan antar ketiganya atau disebut dengan budaya politik campuran. Ketiga budaya politik tersebut yaitu: Budaya Politik Subyek Parokial (transisi dari budaya politik parokial menuju budaya politik subyek; Budaya Politik Partisipan Subyek merupakan transisi dari budaya politik subyek (pemerintahan terpusat) menuju budaya politik partisipan (demokratis); sementara Budaya Politik Parokial-Partisipan yaitu budaya politik yang memiliki dominasi tipe kebudayaan parokial.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk dikaji bagaimana budaya politik warga NU kota Bandar Lampung dari kalangan pengurus struktural dan kalangan pondok pesantren dalam momentum pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Metode

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian campuran (*mixed method*), dengan menggunakan tipe *concurrent embedded*, yaitu tipe penelitian yang menggabungkan pendekatan deskriptif-kualitatif sebagai data primer dan data kuantitatif sebagai data sekunder atau pelengkap (Sugiyono, 2020). Pendekatan campuran memungkinkan peneliti menggunakan dua pendekatan sekaligus (kualitatif dan kuantitatif) (Ivankova & Plano Clark, 2018). Melalui pendekatan campuran juga memungkinkan hasil penelitian yang komplit, di mana salah satu pendekatan bisa saling menyempurnakan pendekatan lain (Fox & Alldred, 2018). Pertama, data kualitatif sebagai data primer dipilih karena dalam meneliti kiai dan elite NU diperlukan wawancara mendalam melalui pendekatan kualitatif, sementara untuk santri dengan jumlah yang cukup besar diperlukan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian dipilih dengan pertimbangan ideal data yaitu keterwakilan antara pengurus NU struktural terdiri dari satu orang Mustasyar (Penasihat), satu orang pengurus Syuriyah (Pimpinan tertinggi), dan satu orang pengurus Tanfidziyah (Pelaksana Harian). Sementara warga NU kultural yang meliputi kiai dan santri pondok pesantren terdiri dari dua pengasuh pondok pesantren NU di Bandar Lampung yaitu Pondok Pesantren Madarijul Ulum (Teluk Betung Barat) dan Pondok Pesantren Alhikmah (Way

Halim). Kriteria informan NU struktural tersebut dipilih karena pertimbangan memiliki peran penting terkait aktivitas NU di Bandar Lampung sehingga dipilih dengan cara sengaja (*purposive sampling*) sesuai dengan kebutuhan data kualitatif sebagai data primer penelitian (Farrugia, 2019).

Kedua, sampel data kuantitatif sebagai data sekunder (pelengkap) dalam penelitian ini meliputi seluruh santri Pondok Pesantren Madarijul Ulum (Teluk Betung Barat) dan Pondok Pesantren Alhikmah (Way Halim) sebagai populasi. Pemilihan Pondok pesantren tersebut dikarenakan keduanya memiliki ikatan kultural yang kuat dengan Nahdlatul Ulama. Relevansi pemilihan NU dan Pondok pesantren sebagai sumber data tidak terlepas dari kultur patronasi keduanya yang selalu menjadi diskursus dalam mempelajari corak politik NU (Menchik, 2019). Dari 512 total santri Madarijul Ulum, berdasarkan kriteria usia pemilih, tempat asal, dan tingkat pendidikan, maka sampel sebanyak 75 santri yang memenuhi kriteria. Sementara pada Pondok Pesantren Al-Hikmah, dari total 1200 santri, secara *purposive sampling* hanya 69 orang yang memenuhi kriteria. Penelitian ini dilakukan selama periode November 2018 hingga April 2019 di mana periode tersebut adalah masa menjelang pemilihan umum Presiden 2019. Lokus penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah budaya politik dan respons masyarakat NU dalam pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Klasifikasi kebudayaan politik dapat dibagi berdasarkan atas orientasi yang mengonstruksi sebuah kebudayaan politik yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Ketiga orientasi tersebut dinilai berdasarkan empat indikator analisis yaitu: pertama, pengetahuan seseorang tentang negara dan sistem politiknya (sistem sebagai obyek umum). Kedua, struktur dan peranan, elite politik, dan kebijakan (obyek-obyek input). Ketiga, arus penguatan kebijaksanaan (Obyek-obyek output). Keempat, tentang pribadi sebagai anggota sistem politik tersebut (pribadi sebagai obyek) (Almond & Verba, 1989).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara (interview) dan angket (kuesioner). Analisis data dilakukan dengan 2 teknik berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pada pendekatan kualitatif data dianalisis melalui teknik reduksi, penyajian data, serta teknik penarikan kesimpulan (verifikasi). Sementara dalam pendekatan kuantitatif analisis data dilakukan melalui penggunaan statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif tidak digunakan untuk menguji hipotesis, kemudian penelitian ini juga tidak berangkat dari teori yang sudah pasti digunakan, melainkan diperoleh saat peneliti ini dilakukan, oleh karena itu data kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat temuan-temuan yang diperoleh melalui data kualitatif yang ada di lapangan. Melalui penelitian kombinasi, sehingga dapat menjembatani kekurangan yang ada pada salah satu pendekatan (Parjaman & Akhmad, 2019).

Teknik statistik dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik persentase. Dalam persentase, setiap kemungkinan jawaban dapat diperoleh dengan cara membagi frekuensi yang diperoleh yaitu dengan jumlah sampel penelitian, lalu dikalikan dengan 100%. Setelah dihitung, maka hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan sesuai dengan kategori, lalu data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Teknik ini sangat tepat dilakukan untuk menampilkan persentase data kuantitatif dengan lebih komunikatif dalam setiap kategori budaya politik masyarakat NU kultural pondok pesantren di Bandar Lampung sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Persentase

Persentase	Kategori
0-1%	Tidak Ada
2-25%	Sebagian Kecil
26-49%	Kurang Dari Setengahnya
50%	Setengahnya
51-75%	Lebih dari setengahnya
76-99%	Sebagian Besar
100%	Seluruhnya

Sumber: Buku Sugiyono. Data diolah (2021)

Hasil dan Pembahasan

Sistem sebagai obyek umum dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana orientasi kognisi warga NU kota Bandar Lampung tentang Pilpres 2019, orientasi afeksi antusiasme warga NU Bandar Lampung dalam Pilpres 2019 sebagai pesta demokrasi, dan orientasi evaluasi terkait asas pemilu dan demokrasi dalam Pilpres 2019. Obyek-obyek input dalam penelitian ini adalah menganalisis orientasi kognisi warga NU kota Bandar Lampung tentang pencalonan Tokoh NU dalam Pilpres 2019, orientasi afeksi kebanggaan terhadap tokoh NU dalam Pilpres 2019, dan orientasi evaluasi terhadap pencalonan tokoh NU dalam Pilpres 2019. Obyek-obyek *output* dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana orientasi kognisi, afeksi, dan evaluasi tentang tujuan dan gagasan program Ma'ruf Amin sebagai Capres 2019. Pribadi sebagai obyek dalam penelitian ini adalah menganalisis orientasi kognisi bahwa NU sebagai organisasi masyarakat keagamaan, orientasi afeksi kesadaran untuk memenangkan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

a. Aspek Kognitif

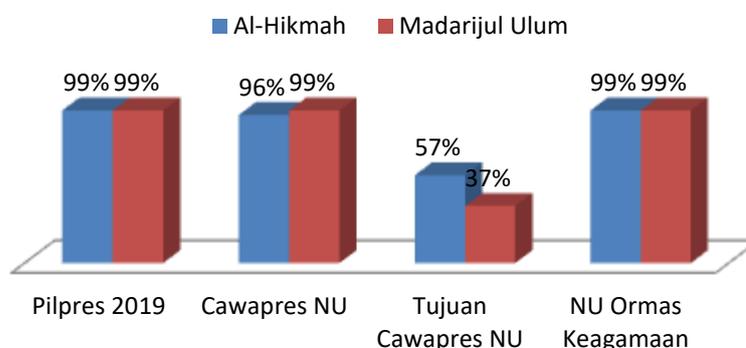


Diagram 1. Orientasi Kognitif Santri Warga NU Bandar Lampung
 Sumber: Penelitian Penulis. Data diolah (2021)

Diagram 1 menampilkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pengetahuan tentang Pilpres 2019 di kalangan santri cukup tinggi mencapai 99%, Pengetahuan tentang Cawapres NU di atas 95%, Pengetahuan tentang NU sebagai ormas juga sangat tinggi mencapai 99%, orientasi terendah pada pemahaman tujuan dan gagasan program Cawapres NU yang berada diangka 37-57%. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa pengetahuan santri di daerah perkotaan terhadap politik terbilang sangat baik dan nilai terendah hanya pada pengetahuan tujuan dan gagasan pencaloan elite NU tersebut.

Angka kuantitatif pada Diagram 1 selaras dengan budaya politik Warga struktural NU Bandar Lampung yang berada di kepengurusan meliputi Mustasyar, Suriah, dan Tanfidziyah baik Pengurus Cabang (PCNU) ataupun Majelis Wilayah Cabang (MWCNU) yang memiliki pemahaman tentang Pilpres 2019. Warga NU struktural memahami Pilpres 2019 sebagai

instrumen demokrasi (*wasilah*) lima tahunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan kekuasaan sah yang berpihak kepada rakyat. NU dan Pilpres tidak memiliki relasi kelembagaan yang mengikat keduanya, akan tetapi NU berorientasi pada politik kebangsaan yang bertujuan pada kemaslahatan dan tidak melarang individu warga NU berpolitik. Warga NU struktural juga mengetahui bahwa NU bukanlah organisasi politik, tetapi bukan berarti warga NU tidak berpolitik. NU bergerak dalam tataran politik etis dan normatif akan tetapi tidak secara praktis. Politik etis dipandang sebuah keharusan karena berkaitan dengan pendidikan dan dakwah. Politik normatif juga dipandang harus karena kesadaran hukum baik negara maupun dalam masyarakat. Politik praktis bukan menjadi gerakan politik NU karena politik praktis mengandalkan kekuatan masa untuk perebutan kekuasaan (*power struggling*).

Muktamar ke-18 di Krapyak Yogyakarta tahun 1989 memberi panduan tertulis tentang pedoman berpolitik warga NU. Poin pertama panduan tersebut menuliskan tentang berpolitik bagi NU adalah mengenai ihwal keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan asas Pancasila dan UUD 1945. Politik bagi warga NU sendiri adalah politik yang berwawasan kebangsaan yaitu politik yang menjunjung persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa yaitu adil dan makmur lahir dan batin sebagai amal ibadah untuk dunia dan akhirat. Warga NU Bandar Lampung memiliki pemahaman tentang tujuan pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Warga NU Bandar Lampung melihat bahwa pencalonan Ma'ruf Amin dilatar belakangi karena kondisi bangsa dan negara di mana urgensi ketokohan Ma'ruf Amin sebagai simbol representasi agamis saat ini diperlukan untuk tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Berdasarkan hal tersebut warga NU struktural Bandar Lampung juga sangat kontradiksi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mencoba mengganggu keutuhan Negara, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga wacana isu menyelamatkan Pancasila menguat pada Pilpres 2019 (Yudiningrum, F. R., 2020). Faktor identitas dalam preferensi politik ini tidak berlebihan jika disebut sebagai bentuk proteksi atas kekhawatiran kemungkinan ancaman berupa paham-paham yang mengarah pada disintegrasi yang juga berbeda (Albintani, 2019). Hal tersebut sangat relevan mengingat prinsip dasar yang dipegang oleh masyarakat NU adalah sikap moderat yang sangat menentang gerakan fundamentalisme beragama termasuk di Bandar Lampung (Mukhlis et al., 2021).

Faktor yang juga mempengaruhi pemahaman warga NU tentang Pilpres adalah karena pendidikan. Jajaran pengurus Mustasyar, Suriah, dan Tanfidziyah PCNU kota Bandar Lampung adalah rata-rata berpendidikan Strata 1 dan 2 (S1/S2) sehingga memiliki wawasan yang luas terhadap dinamika sosial dan politik khususnya Pilpres 2019 yang melihatnya secara bijaksana. Kondisi berbeda pada pengurus tingkat kecamatan (MWCNU) di mana pendidikan yang beragam mulai dari SLTP, SLTA, hingga Strata 1. Pengurus tingkat kecamatan lebih bersifat mengikuti apa yang dilakukan oleh pengurus cabang (PCNU) seperti dalam konteks berpolitik. Artinya bahwa tingkat pendidikan memiliki implikasi kuat terhadap partisipasi dan pemahaman politik masyarakat (Olii, 2018). Pendidikan juga merupakan salah satu variabel penting dalam pembentukan pengetahuan politik masyarakat baik laki-laki maupun perempuan (Dolan & Hansen, 2020).

Warga NU dari kalangan kiai dan santri pondok pesantren memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan warga NU Struktural. Secara gerakan warga NU di kalangan pondok pesantren lebih mengikuti pada patronasi ketokohan tertentu. Jika kalangan Pondok Pesantren biasanya mengikuti apa yang menjadi kebijaksanaan kainya. Jika dimasyarakat mereka akan mengikuti salah satu tokoh yang berpengaruh seperti kiai kampung, inilah yang kemudian kiai disebut sebagai elite lokal. Otorisasi kiai juga terlihat dalam kehidupan pondok pesantren di Bandar Lampung. Sosok kiai yang memiliki karismatik karena keilmuan agama yang mumpuni menjadi faktor otorisasi tersebut melekat kepada kiai. Pondok pesantren Al Hikmah dan Madarijul Ulum sebagai representasi warga NU kultural yang memiliki otoritas lokal kiai dan

santri. Meskipun saat ini terjadi pergeseran bahwa Kiai karismatik yang ada di Bandar Lampung juga terlibat dalam struktural kepengurusan NU baik di tingkat Kota maupun Provinsi sebagai sumber daya yang harus dirangkul bagi kekuatan *jamiyah* NU itu sendiri. Otorisasi tersebut terbentuk oleh habitus seorang kiai bersama dengan tradisinya melalui modal kultur baik *embodied*, *objectified* serta *institutionalized* yang kelak membentuk otoritas kiai tersebut (Lubis & Rohmatillah, 2019).

Kognisi yang dimiliki oleh warga NU kalangan kiai dan santri pondok pesantren bersumber dari kaidah ilmu agama (*fiqh*). Warga NU kultural dinilai juga memiliki kognisi positif terkait dengan politik. Mereka melihat politik dalam orientasi kebangsaan yang berdasar pada sejarah kesepakatan dari beberapa elemen bangsa sesuai dengan UUD 1945 dan Asas Pancasila. Pencalonan Ma'ruf Amin sebagai Cawapres bagi kalangan NU kultural sangat cair. Tokoh NU kultural sepuh Bandar Lampung melihat dengan kebijaksanaannya cenderung netral demi menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Tokoh NU kultural *sepuh* lainnya terdapat juga yang menyayangkan terhadap pencalonan Ma'ruf Amin dengan alasan hilangnya ketokohan kiai dalam politik. Reaksi positif justru hadir di kalangan kiai dan santri pondok pesantren yang menilai Ma'ruf Amin adalah representasi politik kiai dan santri.

Tokoh kiai pondok pesantren menilai tujuan pencalonan Ma'ruf Amin adalah bentuk hak sipil dan politik bagi masyarakat yang dimiliki oleh setiap individu. Kiai juga menilai didasari atas kepentingan umat dan kemaslahatan bangsa dan negara serta secara internal pencalonan Ma'ruf Amin didasarkan atas pertimbangan Ma'ruf Amin yang tidak ada kepentingan di Pemilu 2024. Para kiai juga memiliki harapan besar atas gagasan arus baru ekonomi syariah yang telah sukses diterapkan di pondok pesantren oleh Ma'ruf Amin dalam masa kampanyenya. Konsep arus baru ekonomi yang di canangkan oleh Ma'ruf Amin tersebut yaitu berupa konsep ekonomi yang berorientasi pada ekonomi yang berkeadilan, ekonomi kerakyatan atau keumatan untuk menghilangkan disparitas antara kelompok kaya dan miskin, pusat dan daerah, serta menghilangkan disparitas antara produk lokal dan nasional.

b. Aspek Afektif

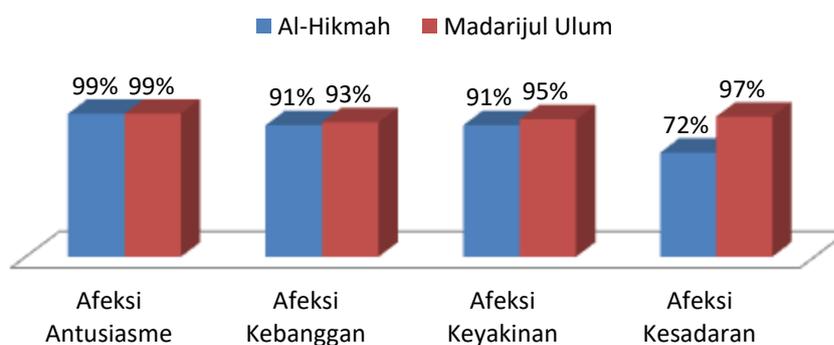


Diagram 2. Orientasi Afektif Santri Warga NU Bandar Lampung
Sumber: Penelitian Penulis. Data diolah (2021)

Diagram 2 menampilkan antusiasme santri terhadap Pilpres terlihat mencapai 99% faktor ketokohan Ma'ruf Amin dinilai menjadi daya tarik santri dalam Pilpres 2019. Kebanggaan terhadap Ma'ruf Amin terbilang tinggi dengan persentase 91-93% santri menilai bahwa Ma'ruf Amin adalah orang tua dari santri-santri NU. Santri juga merasa yakin dengan tujuan dan gagasan Ma'ruf Amin sebagai Cawapres yang mencapai 91-95%. Santri juga berkomitmen untuk memenangkan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 dengan persentase afeksi mencapai 72-97%. Ma'ruf Amin menjadi simbol perjuangan santri-santri NU dalam Pilpres 2019.

Dalam aspek perasaan (afeksi) individu warga NU struktural merasa antusias bahwa Pilpres merupakan pesta demokrasi yang harus dilaksanakan dengan gembira. Kepentingan NU secara organisasi secara substansial bukan pada pertarungan Pilpres secara teknis, akan tetapi lebih luas dari itu adalah kepentingan bagaimana menciptakan Pilpres yang aman dan damai serta kepentingan yang berkaitan dengan akidah *ahlussunnah wal jamaah annahdliyah* dan konsep kebangsaan seperti keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945, Persatuan dan kesatuan. Orientasi afeksi politik warga NU tidak terlepas dari karakteristik akar rumput (*grassroots*) yang berafiliasi pada tradisi pondok pesantren. Hal tersebut dijelaskan oleh ketua PCNU kota Bandar Lampung yang melihat warga NU memiliki karakteristik pondok pesantren dengan patronasi seorang kiai seperti majelis, *thoriqoh*, dan pesantren, sehingga secara politik akar rumput bisa saja bergerak di luar organisasi (*jamiyah*) berdasarkan patronasi seorang kiai.

Warga NU Bandar Lampung dalam struktural juga merasa bangga dengan pencalonan Ma'ruf Amin sebagai cawapres pada gelaran Pilpres 2019. Kebanggaan tersebut dikarenakan pada prinsipnya Ma'ruf Amin adalah representasi politik NU yang memiliki persamaan perjuangan, latar belakang, dan etika santri terhadap kiai (normatif). Kesamaan di dalam sikap sebagai dasar untuk saling tertarik, hal tersebut mempengaruhi perasaan bangga warga NU terhadap pencalonan Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin merepresentasikan sosok agamis karena dirinya merupakan tokoh ulama penting baik sebagai Rais Aam PBNU dan juga ketua MUI Pusat. Afeksi terhadap tujuan dan program dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama, yaitu sudut pandang internal NU, afeksi positif karena Ma'ruf Amin tokoh ideal meng-*counter* ancaman terhadap akidah *ahlussunnah waljamaah annahdliyah* oleh kelompok ekstrem yang berada di kubu oposisi. Kedua, sudut pandang publik adalah karena Ma'ruf Amin memiliki gagasan program Arus Baru ekonomi yang dinilai sebagai solusi tepat terhadap ekonomi bangsa. Pencalonan Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam PBNU dan sebagai ulama yang dihormati di tengah krisis politisasi agama, maka terbangun ikatan emosional warga NU untuk memenangkan tokoh yang dianggap sebagai simbol dan representasi politik warga NU tersebut. Berdasarkan hal tersebut warga NU struktural Kota Bandar Lampung merasa terpanggil untuk memenangkan tokoh Ma'ruf Amin sebagai bagian dari warga NU yang maju dalam Pilpres 2019.

Warga kultural NU baik kalangan tokoh sepuh serta kiai dan santri pondok pesantren cenderung memiliki afeksi yang beragam dibanding dengan NU struktural. Hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya atensi terhadap elemen kultural yang belum dirangkul secara maksimal oleh elite-elite struktural. Tokoh-tokoh *sepuh* yang berada di luar struktural lebih memilih untuk tidak secara tegas menentukan arah dukungan politiknya di publik dan cenderung menahan dengan kebijaksanaannya sebagai *sepuh* NU kultural. Sehingga tokoh NU kultural cenderung tidak bersuara dalam Pilpres 2019 ini. NU memiliki sebuah kultur di mana etika santri harus tunduk dan menghormati seorang kiai agar memperoleh keberkahan ilmu. Terdapat sebuah nilai bahwa dengan tunduk kepada kemauan kiai berdasarkan kepercayaan bahwa sosok kiai sebagai orang suci, serta dapat memberikan keberkahan bagi pengikut atau santrinya. Sehingga hal tersebut mampu mengonstruksi pemahaman warga NU, sehingga mereka memiliki afeksi kebanggaan, hormat, dan taat terhadap Ma'ruf Amin yang maju dalam Pilpres 2019 (Goncung, 2015).

c. Aspek Evaluatif

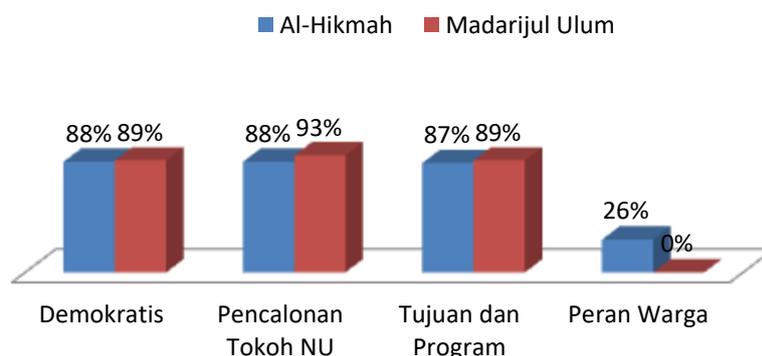


Diagram 3. Orientasi Evaluatif Santri Warga NU Bandar Lampung
Sumber: Penelitian Penulis. Data diolah (2021)

Diagram 3 menunjukkan orientasi evaluatif warga NU kalangan kiai dan santri pondok pesantren terlihat dalam hasil jumlah penilaian terhadap sistem demokrasi (Sistem sebagai obyek umum) cukup tinggi dengan persentase 88-89%, penilaian terhadap elite (obyek-obyek input) sangat tinggi diangka 88-93%, tujuan dan program (obyek-obyek output juga dinilai sangat baik dengan persentase 87-89%, akan tetapi santri pondok pesantren memiliki partisipasi (pribadi sebagai partisipan) sangat rendah (0-26%) hal tersebut sebagian besar di kalangan santri menetap tinggal di pondok pesantren yang sedikit tertutup dengan dunia modern di luar.

Penilaian warga NU struktural kota Bandar Lampung sendiri berkaitan erat dengan orientasi kognitif dan afektif, di mana pengetahuan dan perasaan terhadap sistem politik akan menentukan penilaian terhadap sistem politik tersebut. Berdasarkan afeksi bahwa NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan berfokus pada pemberdayaan umat maka bebas dari intervensi politik praktis, maka warga NU secara individu menanggalkan nama besar organisasi untuk kepentingan hak politiknya dalam politik praktis. Hal tersebut terlihat dalam gerakan politik warga NU Bandar Lampung dalam Pilpres 2019. Banyak warga NU Bandar Lampung yang terlibat dalam politik praktis pada pemilu 2019 baik sebagai calon legislatif, tim pemenangan ataupun dukungan tetapi di atas kertas mereka mengatasnamakan gerakan politik mereka dengan nama pecinta Ma'ruf Amin, Santri Lampung, dan lain-lain dengan tidak membawa nama besar organisasi Nahdlatul Ulama. Namun di sisi lain, hal ini menunjukkan partisipasi politik yang baik dari warga NU sebagai masyarakat sipil dalam berdemokrasi. Tidak absennya anggota masyarakat dalam politik tidak terlepas adanya pengaruh dari elite untuk mendorong anggotanya peduli terhadap perubahan melalui partisipasi politik (Zainuddin, 2018).

Ma'ruf Amin dianggap sebagai representatif politik NU pada Pilpres 2019. Ma'ruf Amin membawa paradigma Islam *wasathiyah* dengan narasi kebangsaan yang akan merangkul semua pihak. Penilaian positif terhadap pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin juga dikarenakan faktor kebijakan Joko Widodo sebagai presiden yang berpihak terhadap warga NU seperti ditetapkannya Hari Santri Nasional, Rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren (RUU) Ponpes, kemudian dilengkapi dengan sosok Ma'ruf Amin yang dinilai memiliki visi misi yang jelas dengan gagasan arus baru ekonomi. Warga kultural NU menilai bahwa Ma'ruf sebagai simbol keterwakilan politik warga NU. Ma'ruf Amin dipercaya sebagai tokoh ulama yang membawa paradigma Islam moderat (*wasathiyah*). Ma'ruf Amin adalah tokoh agama yang berpengaruh. Selain sebagai ketua MUI, dia juga pemimpin tertinggi (Rois Aam) NU yang memperjuangkan Islam moderat (Burhani & Simandjuntak, 2018).

Kiai pondok pesantren NU di Bandar Lampung juga menilai bahwa Ma'ruf Amin memiliki gagasan konsep arus baru ekonomi syariah yang dinilai mampu memecahkan masalah perekonomian bangsa. Disebutkan dalam *Jurnal Perspective* (Burhani & Simanjuntak, 2018) bahwa Ma'ruf Amin menilai hukum syariah perlu diterapkan di Indonesia bukan dalam pengertian radikal, akan tetapi dengan cara-cara demokrasi dan konstitusional. Tidak dipungkiri bahwa Pilpres 2019 merupakan bentuk demarkasi antara kelompok Islam tradisional moderat dengan Ma'ruf Amin sebagai simbol dengan kelompok Islam konservatif pada kelompok *Ijtimak Ulama* dan modern-konservatif yang mengusung Prabowo Subianto. Sejarah membuktikan bahwa NU sebagai Islam tradisional dan moderat selalu kontradiksi terhadap kelompok modern dan konservatif. Hal tersebut dapat dilihat pada latar belakang pendirian NU tahun 1926 yaitu saat penentuan komite Hizaz dan keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952 sebagai dampak tidak terakomodirnya kepentingan Islam tradisional (Fata, 2018).

Berkaca pada tataran historis preferensi politik warga NU baik struktural maupun kultural tidak terlepas dari paham antara tradisional-moderat dengan konservatif, atau bahkan dengan kelompok Islam modern. Demarkasi dua kelompok ini juga terjadi dalam Pilpres 2019 ketika tensi kelompok Islam tradisional moderat (*Islam Nusantara*) selalu berbenturan dengan kelompok Islam konservatif yang menganggap *bid'ah* apa yang dilakukan Islam moderat (Muhammad, 2015). Polarisasi ini yang kemudian membentuk orientasi evaluatif terhadap beberapa elemen akar rumput (*grassroots*) warga NU salah satunya adalah kiai pondok pesantren. Kiai dan santri pondok pesantren merasa satu perjuangan dan persamaan latar belakang dengan Ma'ruf Amin, maka peneliti menilai adalah hal yang memungkinkan terjadi jika hari ini kiai dan santri cenderung mendukung Ma'ruf Amin. Dalam konteks ini terlihat efektivitas dan kekuatan pengaruh elite masyarakat sipil di luar partai politik di kalangan pesantren dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada anggotanya melalui kelompok, tokoh, atau organisasi berpengaruh (Tinov & Handoko, 2016). Pada aspek lain, pada periode pertama masa-masa terakhir pemerintahan Jokowi sebenarnya terdapat penurunan kualitas demokrasi Indonesia, yang berhubungan dengan berlanjutnya penerimaan dan legitimasi atas aliran tertentu dari Islam politik, yaitu konservatisme dan anti-pluralisme; manipulasi partisan terhadap beberapa institusi negara yang utama; serta represi atas oposisi, yang semakin bertambah dan terang-terangan (Power, 2018).

Tabel 3. Tipe Budaya Politik Warga NU Struktural

	Sistem Sebagai Obyek Umum	Obyek-obyek Input	Obyek-Obyek Output	Pribadi Sebagai Partisipan Aktif
Parokial	0	0	0	0
Subyek	1	0	1	0
Partisipan	1	1	1	1

Sumber: Penelitian Penulis. Data diolah (2021)

Tabel 3 Menunjukkan budaya politik warga NU struktural adalah budaya politik partisipan. Artinya adalah warga NU struktural di Bandar Lampung telah memiliki pengetahuan, penilaian, dan evaluasi yang baik atas dinamika politik dalam Pilpres 2019. Warga NU yang ada di struktural pengurus, ternyata memiliki tipe budaya politik Partisipan. Hal tersebut dikarenakan, warga NU struktural memiliki pengetahuan (kognisi), perasaan (afeksi), dan penilaian (evaluasi) yang baik terhadap semua aspek sistem politik, yang meliputi sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input dan output, serta pribadi sebagai obyek dalam sistem terutama dalam konteks Pilpres tahun 2019. Baiknya budaya politik pada masyarakat NU struktural di

Bandar Lampung ternyata belum diikuti dengan kualitas budaya politik pada masyarakat NU kultural sebagaimana dilihat pada [Tabel 4](#).

Tabel 4. Tipe Budaya Politik Warga NU Kultural

	Sistem Sebagai Obyek Umum	Obyek-obyek Input	Obyek-Obyek Output	Pribadi Sebagai Partisipan Aktif
Parokial	0	0	0	0
Subyek	1	0	1	0
Partisipan	1	1	1	1

Sumber: Penelitian Penulis. Data diolah (2021)

[Tabel 4](#) menunjukkan budaya politik yang dimiliki oleh kelompok kiai dan santri kalangan pondok pesantren NU Bandar Lampung atau kultural dari Ponpes Al-Hikmah dan Madarijul Ulum adalah budaya politik peralihan atau transisi budaya politik dari subyek ke partisipan. Hal tersebut terindikasikan karena kelompok ini memiliki penilaian baik terhadap obyek input sistem politik, namun masih memiliki kekurangan pada aspek partisipasi individu. Kondisi inilah yang kemudian turut membentuk sebuah dominasi relasi timbal balik warga NU struktural atas warga NU kultural, sikap patuh terhadap kiai atas perintah elite struktural dan kiai. Bahkan tanpa diperintah pun warga NU kultural kerap mengikuti apa yang dilakukan oleh kainya termasuk dalam aktivitas politik, atau yang kerap disebut dengan relasi patron-klien ([Baghdasaryan, 2017](#)). Pada relasi ini juga obyektivitas bagi masyarakat dengan budaya politik rendah atau pihak yang didominasi dalam relasi patron klien biasanya akan mengesampingkan aspek obyektivitas termasuk dalam konteks ini adalah pilihan politik ([Adams & Neef, 2019](#)). Untuk melakukan transfer pengetahuan semisal kiai ke santri, atau calon kandidat dengan konstituennya dalam hal ini masyarakat NU kultural akan terbentuk sebuah pihak yang berperan sebagai translasi politik, atau yang disebut dengan broker politik ([Pratitaswari & Wardani, 2020](#)). bisa saja pihak tersebut adalah kiai atau pengasuh pondok pesantren yang berperan menerjemahkan kepada santri atau masyarakat sekitar baik dalam bentuk ceramah maupun forum lainnya. Bisa juga tanpa himbauan pun santri dan masyarakat sekitar akan mengikuti apa yang dilakukan kainya. Pemanfaatan agen non formal politik dalam Pemilu seperti tokoh kiai merupakan sebuah bentuk kegagalan atau keterbatasan partai politik yang sebenarnya memiliki peran dalam pendidikan politik kepada masyarakat ([Hasanuddin, 2018](#)). Peran tersebut yang pada akhirnya dilakukan oleh pihak di luar partai politik.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. *Pertama*, budaya politik Warga NU struktural atau pengurus NU Bandar Lampung adalah tipe budaya politik Partisipan, karena memiliki aspek pengetahuan (kognisi), perasaan (afeksi), serta penilaian (evaluasi) yang baik terhadap semua aspek dalam politik yaitu sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, serta pribadi sebagai obyek dalam sistem dalam Pilpres tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor penyebab, di antaranya adalah faktor pendidikan dan lingkungan perkotaan dengan akses informasi yang terbuka. Jajaran pengurus merupakan individu-individu yang telah melek politik. Pengetahuan akan kondisi sosial dan politik dilingkungan sekitar memiliki andil dalam penentuan sikap politiknya. Hal tersebut diperkuat dengan hadirnya sosok penting dalam organisasi NU yang menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan tipe budaya politik warga NU kalangan kultural yaitu kiai dan santri pondok pesantren NU di Bandar Lampung memiliki tipe kebudayaan politik peralihan atau transisi dari budaya politik subyek ke partisipan. Hal tersebut dikarenakan kelompok tersebut memiliki penilaian yang baik terhadap obyek-obyek input, namun masih

memiliki kekurangan terutama dalam partisipasi individu. Kiai dan santri pada umumnya memiliki pengetahuan tentang kondisi politik khususnya kontestasi pemilihan umum. Kiai memiliki peran sentral dalam hal transfer pemahaman dan keilmuan kepada santrinya. Kekuasaan atas intelektual tersebut mendorong kiai memiliki peran strategis dalam membentuk sikap politik para santrinya, akan tetapi keteladanan akan sikap dan kealiman seorang kiai lah menjadi faktor kuat di mana santri akan mengikuti apa yang menjadi sikap guru atau kainya, meski tanpa adanya mobilisasi. Penelitian ini tentu masih memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai budaya politik warga NU baik struktural maupun kultural terutama dalam aspek relasi patron keduanya serta relasi kiai dan santri yang terjalin sehingga membentuk ciri khas kiai dan santri dalam kontestasi politik praktis.

Daftar Pustaka

- Adams, C., & Neef, A. (2019). Patrons of disaster: The role of political patronage in flood response in the Solomon Islands. *World Development Perspectives*, 15(July). <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2019.100128>
- Albintani, M. (2019). Politik Identitas dan Negara Bangsa di Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i1.7054>
- Almond, G. A., & Sidney Verba. (1989). Civic culture. In *Russian Culture at the Crossroads: Paradoxes of Postcommunist Consciousness* (1st ed.). SAGE Publication Ltd.
- Anugrah, I. P. (2021). The Residue of Military Regime During the Early Democratization Era in Indonesia and Myanmar. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(2), 72–79. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.12>
- Baghdasaryan, M. (2017). The practice of political rights and patron–client relations: a case study of a party in Armenia. *Citizenship Studies*, 21(8), 1034–1051. <https://doi.org/10.1080/13621025.2017.1380603>
- BPS Lampung. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Lampung*. <https://lampung.bps.go.id/>
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhani, A., & Simandjuntak, D. (2018). The Maruf Amin Vice Presidential Candidacy: Enticing or Splitting Conservative Vote. *ISEAS: Yusof Ishak Institute Analyse Current Event*, 51. <https://doi.org/ISSN2335-6677>
- Damar, A. M. (2018). *Ma'ruf Amin Jadi Cawapres Jokowi, Warganet Serukan #AlhamdulillahJOIN*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/teknoread/3614714/maruf-amin-jadi-cawapres-jokowi-warganet-serukan-alhamdulillahjoin#>
- Dolan, K., & Hansen, M. A. (2020). The Variable Nature of the Gender Gap in Political Knowledge. *Journal of Women, Politics and Policy*, 41(2), 127–143. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2020.1719000>
- Dwiastuti, R. (2017). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Kuantitatif-kualitatif*. Universitas Brawijaya Press.
- Ellis, N. C. (2019). Essentials of a Theory of Language Cognition. *Modern Language Journal*, 103, 39–60. <https://doi.org/10.1111/modl.12532>
- Farrugia, B. (2019). WASP (write a scientific paper): Sampling in qualitative research. *Early Human Development*, 133, 69–71. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2019.03.016>
- Fata, M. K. (2018). Membaca Polarisasi Santri dalam Kontestasi Pilpres 2019. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 18(2), 325–346.
- Fox, N. J., & Alldred, P. (2018). Mixed methods, materialism and the micropolitics of the research-assemblage. *International Journal of Social Research Methodology*, 21(2), 191–204. <https://doi.org/10.1080/13645579.2017.1350015>
- Goncing, N. (2015). Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru. *The POLITICS : Jurnal Magister*

- Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 61–74.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/134>
- Harring, N., Jagers, S. C., & Matti, S. (2019). The significance of political culture, economic context and instrument type for climate policy support: a cross-national study. *Climate Policy*, 19(5), 636–650. <https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1547181>
- Haryanto, B., Ruldeviyani, Y., Rohman, F., Julius Dimas, T. N., Magdalena, R., & Muhamad Yasil, F. (2019). Facebook analysis of community sentiment on 2019 Indonesian presidential candidates from Facebook opinion data. *Procedia Computer Science*, 161, 715–722. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.175>
- Hasanuddin. (2018). Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30), 94–100. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7062>
- Heywood, A. (2019). *Politics*. Macmillan International Higher Education/Red Globe Press.
- Ivankova, N. V., & Plano Clark, V. L. (2018). Teaching mixed methods research: using a socio-ecological framework as a pedagogical approach for addressing the complexity of the field*. *International Journal of Social Research Methodology*, 21(4), 409–424. <https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1427604>
- Kagan, S., Hauerwaas, A., Holz, V., & Wedler, P. (2018). Culture in sustainable urban development: Practices and policies for spaces of possibility and institutional innovations. *City, Culture and Society*, 13(September), 32–45. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2017.09.005>
- Kayane, Y. (2020). Understanding Sunni-Shi'a sectarianism in contemporary Indonesia: A different voice from Nahdlatul Ulama under pluralist leadership. *Indonesia and the Malay World*, 48(140), 78–96. <https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1675277>
- Kementerian Agama. (2019). *STATISTIK DATA PONDOK PESANTREN*. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=18>
- Khodijah, S., & Subekti, V. S. (2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 177–187. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111>
- Lubis, H., & Rohmatillah, N. (2019). *Komodifikasi Otoritas Komodifikasi Otoritas Kiai Di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*. 2(3), 57–64.
- Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia. *Asian Studies Review*, 43(3), 415–433. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286>
- Muhammad, F. (2015). Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama. *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9(1), 57–76.
- Mukhlis, M., Ulzikri, A. R., & Widiyanto, A. (2021). The Implementation Of nahdlatul Ulama's Moderation Philosophy in Treathing Islamic Fundamentalism in Bandar Lampung. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 21, 1–34.
- Olii, R. R. (2018). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Pada Pilkada Kota Palu Tahun 2015*. 6(1), 42–52.
- Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). Pendekatan Penelitian Kombinasi : Sebagai “ Jalan Tengah ” Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif. *Moderat*, 5(November), 530–548. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Pratitaswari, A., & Wardani, S. B. E. (2020). Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 217–228. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.106>
- Pulcu, E., & Browning, M. (2019). The Misestimation of Uncertainty in Affective Disorders. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(10), 865–875. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.07.007>

- Simanjuntak, B., Antonius, & Sosrodiharjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial* (Revisi).
Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*
(Sutopo (ed.); Revisi). Alfabeta.
- Suryo, H. (2015). Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan.
Transformasi, I(27), 1–47.
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/912>
- Tinov, M., & Handoko, T. (2016). Strategi Politik: Preferensi Partai Politik Menghadapi Pemilu
di Aras Lokal. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(25), 53–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3855>
- Tyson, A., & Purnomo, B. (2017). President Jokowi and the 2014 Obor Rakyat controversy in
Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(1), 117–136.
<https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1258585>
- Ulzikri, A. R. (2019). Politik Nahdlatul Ulama Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden
2019 (Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung) [Universitas Lampung].
In *Digital Repository Universitas Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/56674/>
- Voinea, C. F. (2020). Political culture research: dilemmas and trends. Prologue to the special
issue. *Quality and Quantity*, 54(2), 361–382. <https://doi.org/10.1007/s11135-019-00943-0>
- Zainuddin, M. (2018). Partisipasi Politik: Kajian Rencana Pemekaran Kabupaten Mandau dari
Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(24).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3855>